Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

MENGUJI KRITIK DALAM BINGKAI REALITAS

Aminullah[1], Muhith[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
[1]amienya36@gmail.com, [2]muhiththarasi@gmail.com

ABSTRACT

Criticism is a fundamental instrument in intellectual and social life; however, in practice, its meaning often shifts from a reflective tool to an expression of subjective interests. This phenomenon becomes problematic when criticism is no longer grounded in factual reality but is driven by emotions, prejudice, or hidden agendas. This study aims to examine the nature of criticism and to test its relevance within the framework of social and intellectual reality. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing scholarly works on critical theory, social reality, and public discourse. Data analysis is conducted through content and interpretative analysis to identify the relationship between criticism and the reality that surrounds it. The findings indicate that constructive criticism must be based on rationality, intellectual honesty, and an orientation toward improvement. Criticism detached from reality tends to distort meaning and potentially generate social conflict. This study concludes that sound criticism is not merely an expression of freedom of speech but must be tested through its alignment with reality and moral responsibility.

***Keywords**: criticism, reality, social reflection*

ABSTRAK

Kritik merupakan instrumen penting dalam kehidupan intelektual dan sosial, namun dalam praktiknya sering mengalami pergeseran makna dari sarana refleksi menjadi ekspresi kepentingan subjektif. Fenomena ini menimbulkan persoalan ketika kritik tidak lagi berpijak pada realitas faktual, melainkan didorong oleh emosi, prasangka, atau agenda tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat kritik serta menguji relevansinya dalam bingkai realitas sosial dan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai literatur yang membahas teori kritik, realitas sosial, dan dinamika wacana publik. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dan interpretatif untuk menemukan keterkaitan antara konsep kritik dan realitas yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik yang konstruktif harus memenuhi prinsip rasionalitas, kejujuran intelektual, dan orientasi pada perbaikan. Kritik yang terlepas dari realitas berpotensi menimbulkan distorsi makna serta konflik sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kritik yang sehat bukan

sekadar ekspresi kebebasan berpendapat, tetapi harus diuji melalui kesesuaian dengan realitas dan nilai tanggung jawab moral.

Kata kunci: kritik, realitas, refleksi sosial

A. Pendahuluan

Kritik merupakan mekanisme sosial untuk menguji klaim, memperbaiki keputusan, dan menjaga akuntabilitas, tetapi dalam ruang publik digital kritik sering berkelindan dengan problem realitas: informasi berlebih, kaburnya otoritas evidensial, serta insentif platform yang mendorong sensasi alih-alih verifikasi (Babu, Mishra, Kumar, Pandey, & Pandey, 2025).

Studi tentang ruang publik menegaskan bahwa transformasi digital menuntut pembaruan cara kita menilai "kewajaran" kritik bukan hanya apakah kritik terdengar keras, tetapi apakah ia berlandas alasan, dapat dipertanggung jawabkan, dan membuka kemungkinan koreksi bersama.

Sejumlah temuan mutakhir menunjukkan bahwa kualitas kritik di ruang digital sering terganggu oleh polarisasi dan ketidaksantunan (*incivility*), yang dapat mendorong spiral konflik, menurunkan kepercayaan, dan memperkeras jarak antarkelompok.

Bahkan, riset komputasional skala besar menemukan bahwa toksisitas wacana tidak selalu "lahir dari isu politiknya", melainkan juga dari efek seleksi: pengguna yang cenderung toksik lebih sering masuk dan mendominasi arena diskusi, sehingga kritik berubah menjadi ajang serang personal dan delegitimasi.

Masalah "bingkai realitas" kian kompleks ketika manipulasi konten memperluas peluang distorsi fakta sekaligus merusak prasyarat diskursus rasional di ruang publik digital. Temuan ini menguatkan kebutuhan membedakan kritik yang berfungsi sebagai koreksi berbasis bukti dari kritik yang hanya memproduksi kecurigaan, propaganda, atau disinformasi (Eisenegger & Schäfer, 2023).

Di sisi lain, literatur tentang kualitas diskursus menyoroti pentingnya kebajikan epistemik seperti *intellectual humility* (kerendahan hati intelektual): kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan sendiri, membuka ruang

koreksi, dan menimbang argumen lawan secara adil.

Menariknya, riset terbaru bahkan mulai mengembangkan cara mendeteksi kerendahan hati intelektual dalam wacana publik daring menggunakan pendekatan komputasional, yang memberi peluang metodologis untuk menguji "mutu kritik" secara lebih terukur.

Namun, kajian yang ada masih menyisakan celah: banyak studi membahas *polarisasi, incivility*, dan *disinformasi* secara terpisah, sementara hubungan langsung antara kritik dan realitas yakni bagaimana kritik mengklaim kebenaran, memilih bukti, mendistribusikan kredibilitas, serta memperlakukan pihak yang dikritik belum cukup disatukan dalam satu kerangka evaluatif yang operasional.

Padahal, konsep seperti *epistemic injustice* mengingatkan bahwa distorsi realitas tidak hanya soal salah benar informasi, tetapi juga soal siapa yang dianggap "layak dipercaya" dan siapa yang disenyapkan dalam proses produksi pengetahuan bersama.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian "Menguji Kritik dalam Bingkai Realitas" menawarkan kebaruan atau keunikan pada dua tingkat.

Pertama, secara konseptual penelitian ini mengintegrasikan teori ruang publik digital, etika diskursus, dan keadilan epistemik untuk merumuskan kritik yang "berpijak pada realitas" (*factual evidensial*) sekaligus "berdaya demokratis" (mendorong deliberasi, bukan dominasi).

Kedua, secara metodologis penelitian ini membuka kemungkinan operasionalisasi indikator kritik misalnya (a) ketertautan-bukti (klaim ↔ evidensi), (b) modus penyampaian (kritis vs menghina), dan (c) keadilan kredibilitas (apakah kritik memberi ruang respons dan tidak menutup suara kelompok tertentu) dengan memanfaatkan temuan mutakhir tentang incivility atau toksisitas dan pengukuran kebajikan epistemik di ruang daring.

Urgensi penelitian ini bersifat praktis sekaligus ilmiah. Secara praktis, publik membutuhkan cara yang lebih jernih untuk memilah kritik yang memperbaiki realitas sosial (kebijakan, pendidikan, layanan publik, dan lain-lain) dari kritik yang hanya memproduksi keributan tanpa basis.

Secara ilmiah, penguatan kerangka "uji kritik" membantu menjembatani riset polarisasi atau disinformasi dengan tradisi deliberasi, serta menyediakan landasan untuk intervensi literasi digital yang tidak berhenti pada "cek fakta", tetapi juga mencakup etika berargumentasi dan keadilan dalam mendengar.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada artikel "Menguji Kritik dalam Bingkai Realitas" dirancang sebagai penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*integrative literature review*) untuk mensintesis temuan lintas disiplin tentang kritik, realitas sosial, dan kualitas diskursus publik.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan mengikuti prinsip pelaporan PRISMA 2020 agar proses identifikasi, seleksi, dan pelaporan sumber dapat transparan serta dapat direplikasi (Kutcher & LeBaron, 2022).

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci (*criticism* atau *critique, reality, public discourse, incivility, misinformation, epistemic justice*) pada basis data dan portal ilmiah (*Google Scholar, DOAJ, PubMed*, dan portal penerbit) dengan pembatasan publikasi 5 tahun terakhir (2021–2026) serta jenis dokumen berupa artikel jurnal yang ditelaah sejawat.

Kriteria inklusi menetapkan bahwa artikel harus (1) membahas kritik sebagai praktik wacana (bukan sekadar kritik sastra), (2) memuat dimensi "realitas" (faktualitas, evidensi, konstruksi sosial, atau validasi klaim), dan (3) menyediakan argumentasi konseptual atau temuan empiris yang relevan untuk penyusunan indikator "kritik yang berpijak pada realitas"; sedangkan eksklusi diterapkan pada tulisan yang tidak menyediakan basis metodologis atau argumentatif yang memadai atau berada di luar rentang waktu.

Setelah proses skrining judul abstrak dan telaah teks penuh, data diekstraksi ke dalam matriks sintesis (tujuan studi, konsep kritik, definisi realitas, konteks, temuan kunci, dan implikasi) (Nurhayati & Rosadi, 2022). Analisis data dilakukan dengan qualitative content analysis untuk mengorganisasi unit makna menjadi kategori dan tema penjelas yang konsisten dengan tujuan kajian, serta menekankan keterkaitan makna dengan konteks (Nurhayati, 2023).

Untuk memperdalam penafsiran, peneliti dapat menerapkan *reflexive thematic analysis* (familiarisasi, pengodean, pengembangan tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penulisan) sebagai prosedur interpretatif yang menegaskan peran aktif peneliti dalam produksi makna (Byrne, 2022).

Keabsahan (*trustworthiness*) dijaga melalui audit trail (catatan keputusan seleksi dan pengodean), pembandingan antar-sumber, serta pemeriksaan konsistensi tema terhadap pertanyaan penelitian dan data yang dirujuk.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Kritik dalam Perspektif Teoretis

Dalam kajian teoretis, konsep kritik sering dipandang bukan hanya sebagai evaluasi negatif terhadap suatu fenomena, tetapi sebagai praktik intelektual yang berperan dalam pembentukan pengetahuan dan keadilan sosial. Kritik dalam tradisi Teori Kritis Frankfurt, dipahami sebagai kritik ideologi dan transformasi sosial, yang bertujuan untuk membuka kontradiksi dalam struktur masyarakat modern yang tampak “normal” sehingga memungkinkan perubahan menuju kondisi yang lebih adil dan rasional (Splichal, 2024). Tradisi ini menekankan bahwa kritik harus berakar pada pemahaman dialektis terhadap struktur sosial dan kekuasaan, di mana evaluasi terhadap kondisi aktual membuka jalan bagi kemungkinan pembebasan manusia dari dominasi sosial.

Perspektif Herbert Marcuse dalam Mazhab Frankfurt mengembangkan kritik sebagai alat untuk menilai bagaimana masyarakat industri maju melahirkan manusia satu dimensi yakni kondisi di mana kemampuan berpikir kritis tereduksi oleh dominasi teknologi dan konsumerisme. Kritik dalam konteks ini menjadi sarana untuk menampilkan bagaimana rasionalitas instrumental menekan dimensi reflektif manusia dan menyuburkan struktur kekuasaan yang mengekang kebebasan berpikir.

Dengan demikian, kritik memiliki fungsi analitis sekaligus transformasional: membuka kontradiksi dalam rasionalitas dominan dan menunjuk pada alternatif yang memungkinkan emansipasi sosial meskipun secara historis selalu terkait dengan konteks material tertentu.

Sementara itu, Jürgen Habermas menawarkan pendekatan kritik yang lebih terfokus pada komunikasi rasional. Kritik menurut Habermas bukan hanya soal menyatakan kekeliruan dalam struktur sosial, tetapi terutama soal mencapai pemahaman bersama melalui tindakan komunikatif yang bebas dari dominasi.

Dalam pandangan ini, kualitas kritik diukur dari sejauh mana wacana yang memungkinkan argumen, pembuktian, dan pembelajaran bersama dapat terjadi dalam arena publik; kritik idealnya menjadi proses dialogis yang memperkuat legitimasi argumentatif dan integrasi sosial (Nidzom, Muslih, & Falah, 2025).

Selain tradisi Frankfurt, kajian kontemporer juga meninjau kritik melalui lensa kritik epistemik publik yang menekankan nilai epistemik ruang publik dalam pembentukan pengetahuan kolektif. Studi terbaru menunjukkan bahwa teori ruang public yang awalnya dirumuskan oleh Habermas dalam konteks masyarakat abad ke-20 mengalami krisis konseptual di tengah era digital, di mana publik tidak lagi hanya tempat pembentukan opini rasional melainkan juga arena di mana informasi, disinformasi, dan dinamika kekuasaan epistemik berkontestasi. Kritik, dalam konteks ini, menjadi alat untuk menilai tidak hanya konten diskursus tetapi juga kondisi epistemik di mana wacana itu diproduksi dan dibagikan (Younas, Kvist, & Stolt, 2026).

Konsep kritik juga dikaitkan dengan analisis hegemoni pengetahuan dan tantangan epistemik di ruang publik. Kritik bukan hanya menguji validitas klaim empiris atau normatif, tetapi juga mempertanyakan struktur dan distribusi otoritas epistemik, yaitu siapa yang dianggap memiliki kapasitas untuk ‘mengetahui’ atau ‘mengklaim kebenaran’. Kajian ini mendekati kritik sebagai praktik epistemik yang mempertanyakan struktur dominasi pengetahuan, di mana evaluasi tentang kebenaran tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan teknologi yang berubah, termasuk tantangan media digital yang dapat memperluas atau mengaburkan titik-titik otoritas komunikasi publik.

Dengan demikian, teoretisasi kritik dalam literatur kontemporer memperluas pemahaman klasik menjadi lebih dinamis: kritik tidak hanya terkait dengan evaluasi moral

atau logis terhadap suatu objek, tetapi juga dengan mekanisme sosial di mana pengetahuan itu diproduksi, diperdengarkan, dan diuji oleh komunitas (Work, 2025).

Konsep ini menegaskan bahwa kritik memiliki dimensi normatif, epistemik, dan praksis yakni sebagai alat untuk memahami, menilai, dan secara aktif mengubah kondisi sosial dalam arah yang lebih responsif terhadap nilai-nilai demokratis dan keadilan epistemik.

Realitas sebagai Bingkai Uji Kritik

Realitas berfungsi sebagai bingkai uji bagi kritik karena kritik pada dasarnya adalah klaim tentang "apa yang salah atau kurang tepat" pada suatu keadaan, sehingga validitasnya harus ditopang oleh keterhubungan yang jelas antara argument bukti konteks. Dalam ruang publik digital, "realitas" tidak hanya dipahami sebagai fakta empiris yang dapat diverifikasi, tetapi juga sebagai kondisi sosial epistemik: bagaimana informasi diproduksi, siapa yang dianggap kredibel, dan mekanisme apa yang membuat suatu klaim diterima atau ditolak. Ketika kritik dilepaskan dari rujukan realitas (data, konteks, prosedur verifikasi), ia mudah berubah menjadi opini yang memutlakkan diri, sementara kritik yang menempel pada realitas cenderung bersifat korektif dan membuka ruang pembelajaran bersama (Mamakos & Finkel, 2023).

Bingkai realitas juga menuntut perhatian pada keadilan epistemik: kritik tidak cukup "benar secara data" jika prosesnya menciptakan ketimpangan dalam distribusi suara, misalnya meniadakan pengalaman kelompok tertentu atau menurunkan bobot pengetahuan yang relevan untuk keputusan kolektif. Konsep epistemic injustice menjelaskan bahwa realitas sosial dapat "terdistorsi" bukan hanya karena misinformasi, tetapi karena adanya mekanisme yang membuat pengetahuan tertentu tidak diakui (misrecognition) atau tidak mendapat tempat dalam deliberasi public (Hynek, Gavurova, & Kubak, 2025).

Dalam kerangka ini, kritik yang bertanggung jawab perlu diuji: apakah ia menilai isu secara proporsional berbasis bukti, serta apakah ia memperlakukan subjek yang dikritik secara adil dalam hal kredibilitas dan kesempatan menjawab.

Pada era konten sintetis, "realitas" sebagai bingkai uji kritik semakin krusial karena batas antara

yang faktual dan yang manipulatif kian kabur, sehingga kritik berbasis potongan video atau audio saja menjadi rawan salah sasaran. Studi tentang deepfake dalam ruang publik digital menunjukkan dampaknya pada distorsi diskursus rasional dan erosi kepercayaan publik, yang pada gilirannya membuat kritik mudah dipersenjatai menjadi delegitimasi tanpa verifikasi memadai.

Dalam kondisi ini, kritik yang matang perlu disertai epistemic virtues seperti kerendahan hati intelektual kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan sendiri, menunda kesimpulan, dan membuka diri pada koreksi yang kini bahkan mulai dioperasionalisasi dan diukur dalam wacana daring

Dinamika Kritik dalam Praktik Sosial

Dalam praktik sosial, kritik hidup di dalam arena interaksi yang dipenuhi kepentingan, emosi, identitas kelompok, dan aturan komunikasi yang tidak selalu seimbang; karena itu, kritik sering bergeser dari “alat koreksi” menjadi “alat kontestasi” untuk memenangkan posisi moral atau simbolik (Chen, Song, & Guo, 2024).

Di ruang publik digital, kritik kerap muncul sebagai respons atas perbedaan pandangan, tetapi perbedaan itu mudah berubah menjadi ketidaksantunan (*incivility*) ketika ekspresi kritik diarahkan pada merendahkan pihak lain atau menstigma identitasnya, bukan menguji argumen dan bukti.

Studi empiris menunjukkan bahwa paparan dan ekspresi pesan yang tidak santun berkorelasi dengan meningkatnya polarisasi, sehingga kritik yang seharusnya membuka deliberasi justru memperkeras batas “kami mereka” dan melemahkan peluang koreksi bersama.

Dinamika kritik juga dipengaruhi oleh siapa yang berbicara dan bagaimana kebiasaan komunikasinya terbentuk secara berulang. Riset skala besar tentang wacana pengguna partisan menemukan pola penting: diskursus yang toksik tidak hanya terjadi pada ruang yang jelas-jelas politis, tetapi dapat “menular” ke konteks non politik karena sebagian pengguna yang cenderung toksik membawa gaya komunikasi yang sama lintas topik.

Implikasinya, kritik dalam praktik sosial bukan sekadar perkara isi argumen, melainkan juga watak

interaksi: ketika gaya kritik didominasi serangan personal, sarkasme, atau delegitimasi, maka realitas sosial yang dihasilkan adalah iklim permusuhan dan ketidakpercayaan, meskipun isu yang dibahas sebetulnya netral.

Pada level institusional, dinamika kritik turut dibentuk oleh arsitektur platform dan mekanisme regulasi yang menentukan insentif visibilitas (apa yang "naik") serta batas tanggung jawab (apa yang "ditertibkan"). Analisis tentang "post-public sphere" menegaskan bahwa platformisasi memunculkan tantangan baru bagi ideal ruang publik: kritik dapat menjadi lebih masif dan cepat, tetapi juga lebih mudah dipelintir oleh logika perhatian dan konflik, sehingga negara dan lembaga terdorong menuju bentuk "neo regulation" untuk merespons dampak disruptif platform terhadap demokrasi (Cooke et al., 2024).

Di ranah akademik, kritik formal dalam peer review menunjukkan dinamika serupa: kritik diperlukan untuk menjaga mutu pengetahuan, tetapi praktiknya memiliki kelemahan dan risiko "harm", sehingga pendekatan harm reduction diajukan untuk mempertahankan fungsi kritik sambil meminimalkan dampak buruknya melalui perbaikan prosedur dan pelatihan aktor-aktor penilai (Mamakos & Finkel, 2023).

Kriteria Kritik yang Berbasis Realitas

Kriteria pertama kritik yang berbasis realitas adalah keterikatan yang ketat antara klaim, bukti, dan konteks: kritik tidak berhenti pada penilaian, tetapi menunjukkan mengapa buruk melalui data yang dapat ditelusuri, sumber yang kredibel, serta penjelasan kondisi yang melingkupi (waktu, aktor, batasan, dan konsekuensi). Dalam kerangka ini, kritik yang kuat memperlihatkan jejak penalaran bagaimana bukti dipilih, bagaimana alternatif ditimbang, dan bagaimana kesimpulan ditarik sehingga kritik dapat diuji, dibantah, atau diperbaiki secara rasional, bukan sekadar diterima karena retorika (Dawson et al., 2024). Karena itu, kritik berbasis realitas mensyaratkan standar argumentasi: alasan yang eksplisit, justifikasi yang memadai, dan kesadaran terhadap keterbatasan data yang digunakan (Yang, Bhagat, Zhang, Lampropoulos, & Guo, 2025).

Kriteria kedua adalah kejujuran intelektual dan kerendahan hati

epistemik (*intellectual humility*), yakni kesiapan mengakui bahwa keyakinan sendiri mungkin keliru, membuka ruang koreksi, serta membedakan antara fakta, interpretasi, dan opini. Penelitian mutakhir tentang kerendahan hati intelektual dalam wacana daring menekankan bahwa kualitas diskursus tidak hanya ditentukan oleh "mengurangi keburukan", tetapi juga dengan menumbuhkan kebajikan epistemik yang membuat kritik lebih kooperatif, lebih dapat diuji, dan tidak mudah berubah menjadi kepastian semu.

Dengan demikian, kritik yang berbasis realitas bukan kritik yang paling keras, melainkan kritik yang paling bersedia menanggung beban pembuktian, mengoreksi diri bila perlu, dan mengutamakan pencarian kebenaran dibanding kemenangan wacana. Kriteria ketiga adalah keadilan epistemik, yaitu kritik tidak menutup akses realitas dengan cara mendiskon pengetahuan yang relevan terutama dari kelompok atau pihak yang rentan hanya karena prasangka, status sosial, atau bias institusional.

Konsep epistemic injustice menegaskan bahwa kerusakan pada realitas kolektif bisa terjadi ketika pengetahuan yang dibutuhkan untuk keputusan bersama tidak diakui atau dipinggirkan, sehingga kritik yang "tampak rasional" tetap dapat menghasilkan ketidakadilan bila ia membatasi siapa yang boleh dianggap kredibel dan siapa yang tidak. Maka, kritik berbasis realitas perlu memuat prinsip proporsionalitas dan fair hearing: memberi ruang respons, menghindari generalisasi yang menghapus pengalaman pihak lain, serta memastikan bahwa penilaian bertumpu pada alasan dan bukti bukan pada stigma, ejekan, atau delegitimasi (Reibold, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa kritik merupakan praktik intelektual dan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari realitas sebagai bingkai pengujinya. Kritik yang bermakna bukan sekadar ekspresi penilaian atau perbedaan pendapat, melainkan proses argumentatif yang menuntut keterhubungan yang jelas antara klaim, bukti, dan konteks.

Ketika kritik dipisahkan dari realitas faktual dan kondisi sosial-epistemik yang melingkupinya, kritik berpotensi berubah menjadi opini

sepihak, retorika emosional, atau bahkan instrumen delegitimasi yang merusak kualitas diskursus publik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik sosial kontemporer terutama di ruang publik digital kritik mengalami dinamika yang kompleks akibat polarisasi, ketidaksantunan, arsitektur platform, serta ketimpangan distribusi otoritas epistemik.

Oleh karena itu, pengujian kritik tidak cukup dilakukan pada level kebenaran empiris semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi etis dan epistemik, seperti kejujuran intelektual, kerendahan hati epistemik, serta keadilan dalam memperlakukan pengetahuan dan suara pihak lain. Kritik yang mengabaikan dimensi-dimensi tersebut cenderung memperkeras konflik sosial dan melemahkan kepercayaan kolektif terhadap proses deliberasi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik yang berbasis realitas adalah kritik yang rasional, adil, dan berorientasi pada perbaikan, bukan pada kemenangan wacana atau peneguhan identitas kelompok. Konsep ini memperkuat pemahaman bahwa kritik seharusnya berfungsi sebagai sarana koreksi dan pembelajaran bersama dalam kehidupan sosial dan akademik.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan budaya kritik yang lebih bertanggung jawab, baik dalam ruang publik digital, institusi akademik, maupun praktik sosial yang lebih luas, serta membuka peluang penelitian lanjutan tentang operasionalisasi indikator kritik yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Babu, Y., Mishra, P., Kumar, A., Pandey, C. S., & Pandey, S. (2025). Epistemic injustices and curriculum: Strategizing for justice. *Social Sciences & Humanities Open*, *11*, 101220.

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, *56*(3), 1391–1412.

Chen, H.-T., Song, Y., & Guo, J. (2024). When disagreement becomes uncivil on social media: the role of passive receiving and active expression of incivility in influencing political polarization. *Communication Research*, 00936502241285069.

Cooke, S. J., Young, N., Peiman, K. S., Roche, D. G., Clements, J. C., Kadykalo, A. N., … Lennox, R. J. (2024). A harm reduction approach to improving peer review by acknowledging its

imperfections. *Facets*, *9*(1), 1–14.

Dawson, C., Julku, H., Pihlajamäki, M., Kaakinen, J. K., Schooler, J. W., & Simola, J. (2024). Evidence-based scientific thinking and decision-making in everyday life. *Cognitive Research: Principles and Implications*, *9*(1), 50.

Eisenegger, M., & Schäfer, M. S. (2023). Reconceptualizing public sphere (s) in the digital age? On the role and future of public sphere theory. *Communication Theory*, *33*(2–3), 61–69.

Hynek, N., Gavurova, B., & Kubak, M. (2025). Risks and benefits of artificial intelligence deepfakes: Systematic review and comparison of public attitudes in seven European Countries. *Journal of Innovation & Knowledge*, *10*(5), 100782.

Kutcher, A. M., & LeBaron, V. T. (2022). A simple guide for completing an integrative review using an example article. *Journal of Professional Nursing*, *40*, 13–19.

Mamakos, M., & Finkel, E. J. (2023). The social media discourse of engaged partisans is toxic even when politics are irrelevant. *PNAS Nexus*, *2*(10), pgad325.

Nidzom, M. F., Muslih, M., & Falah, M. Z. N. (2025). Critical theory and social science: A philosophical comparison of Herbert Marcuse and Jürgen Habermas. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, *11*(2), 383–402.

Nurhayati. (2023). DETERMINASI KINERJA GURU : PENGEMBANGAN KURIKULUM, KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH. *Jurnal Mumtaz Juli*, *3*(2), 106–116.

Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, *3*(1), 451–464.

Reibold, K. (2025). Knowledge-specific epistemic injustice. *Inquiry*, 1–27.

Splichal, S. (2024). Between (conceptual) crisis and critique: reclaiming the critical epistemic value of publicness. *Critical Sociology*, *50*(4–5), 673–690.

Work, E. (2025). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Yang, F.-Y., Bhagat, K. K., Zhang, W.-Y., Lampropoulos, G., & Guo, Y.-T. (2025). Analysing the relationships between argumentative reasoning and justification beliefs and the effects of prior experience of scientific information. *International Journal of Science Education*, 1–25.

Younas, A., Kvist, T., & Stolt, M. (2026). Framework and key considerations for designing and conducting critical mixed-methods research (cMMR). *J Epidemiol Community Health*, *80*(1), 55–61.